

18. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja

Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX) yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Koperasi,

UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 juga berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian Koperasi dan UKM serta Renja Kementerian Ketenagakerjaan) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja KemenkopUKM, Renja Kemenaker, Renja DinkopUKM Jatim dan Renja Disnakertrans Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025. Sedangkan RKA Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kota Blitar Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026 ;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
34. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19);

36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX).
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian target Renstra s/d tahun 2024, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar serta daftar program dan kegiatan tahun 2025.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V. Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja atau Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Oleh karena itu dalam hal evaluasi perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antara kinerja renja dengan renstra perangkat daerah periode berjalan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang telah berkesinambungan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2023 dengan mengacu pada APBD Tahun 2023 untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ;
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Program Penempatan Tenaga Kerja;
11. Program Hubungan Industrial.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Tenaga Kerja										
					Bidang Urusan Ketenagakerjaan										
					Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72	%		70	69,53	99	70,50	70	97
					Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	90	%		82	91,91	112,09	85	85	91
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	%		46	56	121,74	47	47	94
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	%		82	82	101,22	83	83	93
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	650	orang		450	466	103,56	175	175	27
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83	%		77	90	116,88	79	79	95
						Persentase jumlah calon tenaga kerja yang	20	%		0	0	-	14	14	70

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						terserap melalui bursa kerja online									
					Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	900	orang		170	289	170	150	150	17
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300	orang		150	150	100	150	150	50
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	37,1	%		0	45	-	32,7	32,7	88
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	390	orang		0	0	-	0	0	-
					Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	174	orang		30	10	33	30	30	17
					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	22	%		18	43,39	241,05	19	19	86
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	%		100	90	90	100	100	100
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	350	perusahaan		55	55	100	75	75	21

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	perkara		5	n/a	n/a	5	5	5
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	14	perkara		1	1	100	0	0	-
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12	Asosiasi dan serikat pekerja		4	n/a	-	4	4	33
					Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,25	%		2,1	n/a	-	2,15	2,15	96
					Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	39,5	%		36,7	48,23	131	37,8	37,8	96

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26	%		22	22	100	23	23	88
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15	Unit usaha		3	3	100	3	3	20
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit usaha	30	10	10	100	10	10	25
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	%		36	36	100	36,4	36,4	95
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5	%		5	5	100	5	5	100
					Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	orang		40	40	100	50	50	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKM yang menjadi peserta pelatihan	38,5	%		36,4	36,4	100	36,4	36,4	95
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	610	orang		160	160	100	160	160	26
					Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi	39	%		36	36	100	37	37	95
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	37	%		33	33	100	34	34	92
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	32	%		28	28	100	29	29	91
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	320	Unit usaha		80	80	100	50	50	16

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	%		29	29	100	30	30	91
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	400	Unit usaha		100	100	100	100	100	20
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	%		32	62	192	34	34	85
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	%		11	62	559	12	12	80
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120	orang		30	30	100	30	30	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40	keluarga		10	10	100	10	10	25
					Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan WUB	2	%		1,75	33,33	1904	1,9	1,9	95
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	2	%		1,8	0,95	52,57	1,85	1,85	93
						Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6	%		2,3	2,3	100	2,3	2,3	88
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	%		100	37	37	100	100	100
						Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	12000	Unit usaha		12000	12000	100	12000	12000	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200	Unit usaha		25	25	100	50	50	25
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	orang		75	75	100	25	25	25
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200	orang		50	50	100	50	50	25
					Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	%		1,85	21,79	1177	1,85	1,85	93
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan	2	%		0	1,16	-	1,7	1,7	85
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan	100	%		100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	400	Unit usaha		100	100	100	100	100	25
					Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	Nilai angka		83,56	81,17	99,15	84	84	100
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	Nilai angka		83,56	81,17	99,15	84	84	100
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	indeks	0	81	82,93	102	81,5	81,5	100
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	5	2	2	100	5	5	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	laporan	5	3	3	100	4	4	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	94	94	100	100	100
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	Orang/bulan	21	23	27	117	27	27	100
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan		12	12	100	12	12	100
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	0	100	98	98	100	100	100
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket		2	2	100	2	2	100
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	100	50	50	100	50	50	100
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100	%	0	100	99	99	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						perangkat daerah sesuai standar									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	2	2	2	100	3	3	100
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket		10	10	100	10	10	100
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	24	12	12	100	12	12	100
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	17	12	12	100	12	12	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen		0	0	100	0	-	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100	%	0	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4	12	12	100	12	12	100
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan		12	12	100	12	12	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	%		100	100	100	100	100	100
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit		0	-	100	0	0	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	unit		25	25	100	25	25	100
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	unit		3	3	100	3	3	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit		0	-	100	0	0	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6	0	-	100	0	0	-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	0	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	13	13	13	100	10	10	100
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	unit		0	0	-	0	0	-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit		10	10	100	10	10	100
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	1	1	100	1	1	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan periodisasi Renstra antara tahun 2021 dan 2022. Capaian kinerja Renja Tahun 2021 tidak disajikan dalam tabel karena masuk dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja periode Tahun 2016 – 2021 sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap capaian target indikator tahun 2021 dan tahun 2022. Selain itu, dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan maupun sub kegiatan sehingga berbeda dengan tahun 2022.

Analisis atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga Kerja Kota Blitar.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Kompeten dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Pencari Kerja Kompeten	82 %	82,16%	100,20

Keterangan:

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.034 orang pencaker sedangkan jumlah pencari kerja seluruhnya di tahun 2023 sebanyak 1.125 orang pencaker.

Hal ini karena pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan lowongan kerja yang ada dan kompetensi pencari kerja sesuai dengan bidang yang tersedia.

b. Sasaran 2: Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Perusahaan yang patuh aturan Ketenagakerjaan	18%	21,90%	122,67

Keterangan :

Perusahaan yang terdaftar di Kota Blitar sebanyak 242 perusahaan sedangkan BUMD, BUMN dan atau perusahaan swasta besar lainnya sebanyak 105 perusahaan sudah patuh aturan ketenagakerjaan dengan membayar sesuai umk dan mempunyai perjanjian kerja bersama, hal ini terjadi karena adanya pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Koperasi Aktif	36,7 %	38,65%	105,3

Keterangan :

Koperasi di Kota Blitar sejumlah 282 koperasi sedangkan koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahun, sudah update sertipikat NIK dan menyusun dan menyampaikan laporan tribulanan secara rutin sebanyak 136 koperasi, upaya yang dilakukan agar koperasi menjadi koperasi aktif adalah melakukan Fasilitasi Pendampingan, pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi.

d. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Koperasi

Indikator Kinerja Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	36 %	36,1%	100,28

Keterangan

Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi sebanyak 100 koperasi sedangkan Jumlah KSP/USP seluruhnya sebanyak 277 koperasi, untuk mendorong agar KSP/USP naik klasifikasinya dilakukan Pendampingan dan pembinaan kepada koperasi secara berkelanjutan.

e. Sasaran 5: Meningkatnya Usaha Mikro yang naik kelas mempunyai indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	1,85 %	21,79%	1177,83

Keterangan:

Jumlah UM yang omzetnya naik tahun 2023 sebanyak 3.043 sedangkan jumlah UM Tahun 2023 sebanyak 13.965, faktor pendukung keberhasilan tersebut Pendampingan pasca pelatihan, fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan sedangkan kendala yang dihadapi Banyaknya pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi jumlah omzet usahanya dengan alasan pembinaan pelaku usaha kecil ada di tingkat provinsi. Untuk itu dilakukan updating data secara berkelanjutan.

f. Sasaran 6: Meningkatnya Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan uraian:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,75%	33,33%	1904,57

Keterangan:

Jumlah WUB tahun 2023 sebanyak 64 WUB sedangkan jumlah WUB thn sebelumnya sebanyak 48 WUB keberhasilan ini didukung dengan Fasilitas Pelatihan Kewirausahaan dan pendampingan pasca pelatihan dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan, untuk terus menumbuhkan WUB.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

Sampai dengan tahun 2022, capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja
Kota Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
I	INDIKATOR TUJUAN													
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKK	70	70,5	71	71,5	72	67,78	72,26	72,26	72,265	72,3	Tercapai 101,77% , kategori Berhasil
2.	Persentase Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		IKK	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	n/a	2,82	2,95	3,05	3,1	Tercapai 100%, kategori berhasil
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKK	83,56	83,56	84,00	84,25	84,5	83,16	81,17	84	84,25	84,5	Tercapai 96,43% Kategori berhasil
II	INDIKATOR SASARAN													
1.	Persentase pencari kerja yang berkompeten		IKU	80	82	85	87	90	66	82,16	85	87	89	Tercapai 108,14% Kategori berhasil
2.	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan		IKU	16	18	19	21	22	30	21,90	22	24	25	Tercapai 228,37% Kategori berhasil

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
3.	Persentase Koperasi Aktif		IKU	35,6	36,7	37,8	38,8	39,5	48,9	38,65	39	40	41	Tercapai 127,59% Kategori berhasil
4.	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi		IKU	35	36	37	38	39	39	36,1	37	38	39	Tercapai 97,57% Kategori berhasil
5.	Persentase Pertumbuhan WUB		IKU	1,6	1,75	1,9	1,95	2	1,62	33,33	1,9	1,95	2,0	Tercapai 1754,21% Kategori berhasil
6.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas		IKU	1,6	1,85	1,9	1,95	2	n/a	1,97	1,9	1,95	2,0	Tercapai 1146,84% Kategori berhasil
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	83,56	83,56	84,00	84,25	84,5	83,34	81,17	81,17	84,25	84,5	Tercapai 96,63% Kategori berhasil

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, disajikan data capaian indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama tahun 2022 dan 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 masih disajikan data proyeksi karena tahun 2024 masih dalam proses pelaksanaan.

Beberapa langkah dan strategi yang diupayakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam mencapai kinerja dengan maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pendukung usaha dengan melibatkan berbagai lembaga yang menyediakan dukungan bagi koperasi dan UMKM untuk mengakses sumber daya produktif. Sumber daya produktif ini meliputi bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi, dan teknologi. Selain itu, perluasan usaha juga mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, kapasitas usaha, dan perluasan jangkauan pasar.
- b. Melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM khususnya dengan berfokus pada peningkatan kualitas kelembagaan dan perbaikan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini mencakup aspek kewirausahaan, kemampuan teknis, manajemen, dan pemasaran. Dengan SDM yang berkualitas, koperasi dan UMKM dapat beroperasi lebih efisien dan efektif.
- c. Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mendorong kewirausahaan. Melaksanakan pengawasan hukum, memastikan pembayaran upah yang sesuai peraturan, dan memantau kondisi kerja yang layak. Mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Dinas bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi serta UKM melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan. Kendala yang sering dihadapi meliputi kurangnya akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan yang memadai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dinas perlu memastikan adanya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, isu terkait perlindungan tenaga kerja, baik dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja maupun perlindungan hak-hak tenaga kerja, juga menjadi fokus utama.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi, UKM dan tenaga kerja di daerah, dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut.

- a. Kurangnya daya saing usaha mikro. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan akses permodalan, teknologi dan informasi pasar. Keterbatasan SDM terampil dan pengelolaan usaha yang kurang profesional juga turut menghambat potensi usaha mikro untuk berkembang dan bersaing dengan baik.
- b. Kurangnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, akibatnya tingkat pengangguran meningkat dan perusahaan semakin kesulitan dalam proses rekrutmen.

- c. Belum optimalnya pengelolaan koperasi. Hal ini sering disebabkan oleh kelemahan dalam kelembagaan organisasi, kurangnya profesionalisme dalam manajemen, dan keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan pelatihan.
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pencarian dan penempatan tenaga kerja yang terintegrasi dapat menghambat pencocokan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, memperpanjang waktu penempatan, dan mengurangi efektivitas dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

- 1) Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
- 2) Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital;
- 3) Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing;
- 4) Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- 5) Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi; dan
- 6) Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka mengimplementasikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD: Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48 %	1.999.999.700	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48 %	1.924.999.800	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan terlatih	85 %	1.999.999.700	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan terlatih	85 %	1.924.999.800	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	1.999.999.700	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi	175 orang	1.924.999.800	Penyesuaian Standar Harga
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	81 %	232.772.300	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	81 %	224.447.400	
			Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	16 %			Kota Blitar	Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	16 %		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota		Jumlah pencari kerja terdaftar	230 orang	23.691.300	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota		Jumlah pencari kerja terdaftar	230 orang	23.691.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Blitar	Jumlah pencari yg mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	23.691.300	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Kota Blitar	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	50 orang	23.691.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	33,3 %	209.081.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Blitar	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui nformasi pasar kerja	33,3 %	200.756.400	Penyesuaian Standar Harga
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	120 orang	83.324.600	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	130 orang	75.000.000	Penyesuaian Standar Harga
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	46 orang	125.756.400	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	46 orang	125.756.400	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Blitar	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	175.999.300	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Blitar	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	175.997.900	
	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	85 perusahaan	175.999.300	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	85 perusahaa n	175.997.900	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	102.554.200	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	102.553.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	4 perkara	1.095.200	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 perkara	1.095.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	4 asosiasi dan serikat pekerja	72.349.900	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi &Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Blitar	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	24 %	293.945.300	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Blitar	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	25 %	143.286.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	293.945.300	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	143.286.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Kota Blitar	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	10 unit usaha	293.945.300	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Kota Blitar	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP	10 unit usaha	143.286.000	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	35 %	18.685.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	31 %	18.685.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	30 %	18.685.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg WilayahKeanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	36 %	18.685.000	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 unit usaha	18.685.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 unit usaha	18.685.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	31 %	65.705.300	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	32 %	75.705.300	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100 %	65.705.300	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	100 %	75.705.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	65.705.300	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan		Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	100 unit usaha	75.705.300	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	37,1 %	495.370.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	37,8 %	239.800.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	5 %	495.370.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	37,8 %	239.800.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	495.370.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 orang	239.800.000	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	36 %	391.764.311	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Blitar	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	38 %	524.491.211	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	13 %	391.764.311	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	14 %	524.491.211	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, & Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 orang	374.984.511	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	30 unit usaha	507.691.811	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Keluarga yg Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dlm Peningkatan Taraf Hidup Keluargamelalui Kehidupan Berkoperasi & Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 keluarga	16.779.800	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Kota Blitar	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	10 unit usaha	16.799.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	1,9 %	843.411.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	1,95 %	977.094.500	
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,4 %				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,5 %		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Kota Blitar	Persentase UM yang diberdayakan melalui	100 %	843.411.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Kota Blitar	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan,	100 %	977.094.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan			Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)			
		Kota Blitar	Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100 %			Kota Blitar	Persentase Kelurahan yang memiliki wirausaha baru minimal 2	100 %		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pendataan UM	1 dokumen	195.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	9000 unit usaha	189.372.600	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	50 unit usaha	295.244.800	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	50 unit usaha	434.555.800	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 orang	111.046.200	Pemulihan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 unit usaha	111.046.200	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usah Mikro dan Kewirausahaan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	242.120.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 orang	242.119.900	Penyesuaian Standar Harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1, 8 %	426.320.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,8 %	666.319.600	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Blitar	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100 %	426.320.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Blitar	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	100 %	666.319.600	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	426.320.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	666.319.600	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	4.842.661.985	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	4.968.291.579	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100 %	39.739.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	100 %	18.684.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5 dokumen	6.356.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5 dokumen	6.356.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	Jumlah Lap Capaian Kinerja&	4 Laporan	33.383.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi	4 Laporan	12.328.500	Pemindahan Alokasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Anggaran antar Subkegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.751.891.785	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.941.500.772	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.746.871.585	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.937.401.572	Penyesuaian Kenaikan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.020.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.099.200	Pemindahan Alokasi Anggaran antar Subkegiatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	100 %	94.743.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	100 %	86.911.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	49.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	37.800.000	Penyesuaian Standar Harga
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	50 orang	45.543.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	50 orang	49.111.000	Penyesuaian Standar Harga
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	317.403.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	319.180.200	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	5.084.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket	5.189.800	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	2 paket	29.108.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	3 paket	23.668.500	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah	1 paket	11.654.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah	1 paket	8.227.900	Penyesuaian Standar Harga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			tangga kantor yang tersedia					tangga kantor yang tersedia			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	22.585.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	24.480.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	24.998.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	24.615.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	217.423.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	222.279.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.150.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.320.000	Penyesuaian Standar Harga
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	340.483.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	350.972.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.948.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67.948.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	272.534.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	283.024.000	Penyesuaian Standar Harga
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	110.421.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	62.414.800	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	23.112.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	23.042.500	Penyesuaian Standar Harga
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	87.309.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	39.372.300	Penyesuaian Standar Harga
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Tidak melakukan pengalokasian anggaran pada tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	36.119.300	Mengganti kendaraan operasional yang sudah tidak layak
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	187.978.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	188.627.507	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	101.531.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	94.479.500	Penyesuaian Standar Harga
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit	5.400.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	19.247.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	20.637.000	Penyesuaian Standar Harga
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	61.800.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	73.511.007	Penyesuaian Standar Harga
					9.786.654.196					9.939.118.290	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan pogram kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi, perangkat daerah juga berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Untuk tahun perencanaan 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mendapatkan usulan dari Program Prioritas, Musrenbang Kecamatan dan Kota serta dari pokok – pokok pikiran DPRD sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel. 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1.	Inkubator Bisnis	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Diakomodasi dalam Renja 2025
2.	Bursa Kerja Online	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Blitar	Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online		Diakomodasi dalam Renja 2025
3.	Blitar StartUp Community	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		Diakomodasi dalam Renja 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
4.	Kurangnya informasi/kapasitas pelaku usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kel. Blitar, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	20 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
5.	Kurangnya informasi/kapasitas pelaku usaha mikro	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kel. Ngadirejo & Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	40 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
6.	Pelatihan pemasaran digital dan desain marketplace untuk UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kec. Sananwetan, Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	290 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
7.	Pelatihan pemasaran digital dan peningkatan usaha mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	120 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
8.	Sosialisasi tentang koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
9.	Pembinaan dan fasilitasi pendampingan pelaku usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	15 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025
10.	Pelatihan pengolahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	10 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025

No	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	produk khas Karangsari	MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
11.	Pelatihan handycraft	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80 orang	Diakomodasi dalam Renja 2025

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk menerjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang meliputi;

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar merumuskan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan berbagai program strategis. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah kegiatan Inkubasi Bisnis dan Start Up Community. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta mendorong munculnya wirausahawan baru melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan bimbingan yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis yang inovatif dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga menyelenggarakan pasar kerja online. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam bertemu dan berinteraksi secara lebih efisien dan efektif di era digital. Dengan adanya pasar kerja online, diharapkan akan tercipta peluang kerja yang lebih luas dan transparan, serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Blitar. Platform ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UKM lokal dengan memperluas akses mereka terhadap tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis digital.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Tujuan							
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Partisipasi Angkatan Kerja Tahun n	70,5	72,26	72,26	72,265	72,3
	Meningkatnya nilai tambah bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase Nilai Tambah bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Jumlah Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro Tahun n	2,1	2,82	2,95	3,05	3,1
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	83,56	81,17	84,00	84,25	84,50
	Sasaran							
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja Berkompeten	Pencari Kerja yang Berkompeten adalah Pencaker yg mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yg di keluarkan oleh BNSP	82	82,16	85	87	89
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Tahun n	n/a	n/a	19	21	22
	Menurunnya Permasalahan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yg melaksanakan pembayaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun	18	21,90	22	24	25

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja					
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahanya, Menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan), Melaksanakan RAT setiap Tahun	36,7	38,65	39	40	41
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	KSP/USP yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	36	36,1	37	38	39
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >1M /tahun	1,85	1,97	1,9	1,95	2,0
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru	Wira Usaha Baru adalah: Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	1,75	33,33	1,9	1,95	2,0
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	83,56	81,17	84,00	84,25	84,50

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel . 3.3

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mendukung pencapaian SPM atau IKK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan & pelaporan yg tepat waktu & sesuai standar	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Lap hasil KoordinasiPenyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yg sesuai standar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU-an	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang terpenuhi	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	URUSAN TENAGA KERJA		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yg mendapat pelatihan berbasis kompetensi	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yg ditempatkan	
		Persentase jumlah calon naker yg terserap melalui bursa kerja online	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yg terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub)	
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	
	Pencegahan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yg mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau PKB	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Persh yg erakibat/Berdampak pd Kepentingan di 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi & Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yg diverifikasi	
	URUSAN KOPERASI UKM		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan	Mendukung pencapaian Tupoksi
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	
	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)	
		Persentase Kelurahan yang memiliki	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		wirausaha baru minimal 2	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 yaitu “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”, dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan;
- b. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital;
- c. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing;
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi;
- f. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja melalui berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan	Blitar Makmur	- Bursa Kerja online-offline - Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional	• Memuat program unggulan inovatif Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-up Community. Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang. Program ini bertujuan semakin menumbuhkan industri kreatif dan kampung kreatif • Blitar Start-Up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital	Blitar Makmur	- Satu kelurahan dua wirausaha - Penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota	

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Tahun 2023 pada Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi untuk mencapai kinerja koperasi di Kota Blitar yang optimal serta akuntabilitas yang lebih baik	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja akan meningkatkan kapasitas pengawas, mengembangkan sistem monitoring, memperkuat regulasi, melakukan audit berkala, memberikan edukasi, meningkatkan kerjasama antar instansi, serta menerapkan pelaporan dan evaluasi rutin untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi	1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota Subkegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota Subkegiatan Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan
2.	Meningkatkan kompetensi pencari kerja di Kota Blitar sehingga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi, mengadakan bursa kerja, menjalin kerjasama dengan industri, serta menyediakan kursus keterampilan khusus	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3.	Optimalisasi database usaha mikro guna meningkatkan akurasi dan kelengkapan data, mempercepat pengambilan keputusan, mendukung penyusunan kebijakan tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program bantuan, memfasilitasi pemantauan dan evaluasi, serta meningkatkan	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar akan memperbarui dan mengintegrasikan data usaha mikro dalam satu database terpadu, mengembangkan sistem informasi yang mendukung, melakukan audit dan validasi data secara berkala, meningkatkan keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	transparansi dan akuntabilitas		
4.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi dan permodalan yang memadai bagi pelaku usaha mikro	Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja akan menyediakan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi akses ke sumber pendanaan yang terjangkau	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Subkegiatan Pemulihan Usaha Mikro 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2023, diolah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025 adalah 11 program, 18 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar		9.939.118.290,00				9.884.652.808,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.325.445.100,00				2.323.300.560,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja		49 Persen	1.924.999.800,00			50 Persen	1.837.500.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih		87 Persen	1.924.999.800,00			90 Persen	1.837.500.000,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		150 Orang	1.924.999.800,00	Dana Transfer Umum-DBHCHT		150 Orang	1.837.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online		82 Persen 18 Persen	224.447.400,00			83 Persen 20 Persen	301.001.295,00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar		260 Orang	23.691.000,00			260 Orang	24.875.865,00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		50 Orang	23.691.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	24.875.865,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja		35.4 Persen	200.756.400,00			37,1 Persen	276.125.430,00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		130 Orang	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		140 Orang	87.490.830,00
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		46 Orang	125.756.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		52 Orang	188.634.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan		100 Persen	175.997.900,00			100 Persen	184.799.265,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama		90 Perusahaan	175.997.900,00			100 Perusahaan	184.799.265,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		5 Perkara	102.553.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Perkara	107.681.910,00
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		5 Perkara	1.095.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Perkara	1.149.960,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	72.349.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	75.967.395,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.613.673.190,00				7.561.352.248,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,50 Angka	4.968.291.579,00			83,00 Angka	5.079.125.085,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan		100 Persen	18.684.500,00			100 Persen	41.726.580,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	6.356.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	6.673.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	12.328.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	35.052.780,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar		100 Persen	3.941.500.772,00			100 Persen	3.939.486.375,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/bulan	3.937.401.572,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		27 Orang/bulan	3.934.215.165,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	4.099.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	5.271.210,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 Persen	86.911.000,00			100 Persen	99.480.150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perangkat Daerah yang sesuai							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	37.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Paket	51.660.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	49.111.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	47.820.150,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar		100 Persen	319.180.200,00			100 Persen	333.273.780,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.189.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	5.338.725,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	23.668.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	30.563.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8.227.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	12.237.330,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	28.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Paket	23.714.250,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	24.615.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	26.248.425,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	5.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	5.670.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	222.279.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	228.294.150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	1.207.500,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sesuai Kebutuhan		100 Persen	62.414.800,00			100 Persen	115.942.995,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	23.042.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	24.268.125,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	39.372.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Unit	91.674.870,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar		100 Persen	350.972.800,00			100 Persen	357.507.360,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12 Laporan	67.948.800,00	Dana Transfer Umum-		12 Laporan	71.346.240,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Dana Bagi Hasil			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	283.024.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	286.161.120,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 Persen	188.627.507,00			100 Persen	191.707.845,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	94.479.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit	106.607.970,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	20.637.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit	20.209.875,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	73.511.007,00	Dana Transfer Umum-		1 Unit	64.890.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dana Bagi Hasil			
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yg diterbitkan		25 Persen	143.286.000,00			26 Persen	308.642.565,00
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan		3 Unit Usaha	143.286.000,00			3 Unit Usaha	308.642.565,00
	Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit Usaha	143.286.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10 Unit Usaha	308.642.565,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi		36 Persen	18.685.000,00			37 Persen	19.619.250,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yg	Persentase koperasi, KSP/USP koperasi yg diperiksa dan diawasi		31 Persen	18.685.000,00			32 Persen	19.619.250,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wilayah Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota								
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		90 Unit Usaha	18.685.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		90 Unit Usaha	19.619.250,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)		32 Persen	75.705.300,00			33 Persen	68.990.565,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian kesehatan koperasi		100 Persen	75.705.300,00			100 Persen	68.990.565,00
	Penilaian Kesehatan meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yg Telah Dilakukan Penilaian/pemeriksaan Kesehatan koperasi		100 Unit Usaha	75.705.300,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		100 Unit Usaha	68.990.565,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		37,8 Persen	239.800.000,00			38,5 Persen	251.790.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan		37,8 Persen	239.800.000,00			38,5 Persen	251.790.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		200 Orang	239.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		200 Orang	251.790.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha		38 Persen	524.491.211,00			40 Persen	411.373.527,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi		14 Persen	524.491.211,00			15 Persen	411.373.527,00
	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kab/Kota		30 Unit Usaha	507.691.811,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		30 Unit Usaha	393.733.737,00
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya		10 Unit	16.799.400,00	Dana Transfer		10 Unit	17.639.790,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang keanggotaannya daerah Kab/Kota			Usaha		Umum-Dana Bagi Hasil		Usaha	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yg mengalami peningkatan volume usaha		1,95 Persen	977.094.500,00			2 Persen	932.175.256,00
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital		2,5 Persen				2,6 Persen	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan)		100 Persen	977.094.500,00			100 Persen	932.175.256,00
		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan		0,5 Persen				0,5 Persen	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata		9000 Unit Usaha	189.372.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		9000 Unit Usaha	198.843.706,00
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yg telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		50 Unit Usaha	434.555.800,00	Dana Transfer Umum-		50 Unit Usaha	362.507.040,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dana Bagi Hasil			
	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		25 Unit Usaha	111.046.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Unit Usaha	116.598.510,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		50 Orang	242.119.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	254.226.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan		1.9 Persen	666.319.600,00			2 Persen	489.636.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan pendampingan		100 Persen	666.319.600,00			100 Persen	489.636.000,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		100 Unit Usaha	666.319.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100 Unit Usaha	489.636.000,00

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar selama satu tahun anggaran. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam penyusunannya, penting untuk melakukan analisis situasi dan kondisi terkini sektor koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan di Kota Blitar. Analisis ini mencakup pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta identifikasi isu-isu dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan dengan RKPD sangat diperlukan. Harmonisasi ini juga melibatkan penyesuaian dengan program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan tidak adanya duplikasi kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, Renja ini tidak hanya menjadi pedoman operasional tahunan tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pembinaan yang semakin kompleks, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam upaya mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan koperasi aktif dan peningkatan kualitas kesehatan koperasi maka koordinasi

dengan perangkat daerah terkait maupun stakeholder harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga efektifitas kinerja akan lebih mudah tercapai.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur koperasi dan usaha mikro dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur koperasi dan usaha mikro.
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.